

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu-isu terkait pupuk di Indonesia lantas berdampak pada kebutuhan pada petani dan keberlanjutan pengerjaan lahan. Oleh sebab itu, apabila tarif pupuk mahal dan melambung tinggi, maka yang menjadi korban pertama adalah para petani. Kebijakan subsidi pupuk untuk para petani telah di umumkan oleh Pemerintah Indonesia. Menimbang pemilihan pemerintah dalam memberikan subsidi pupuk di bawah program pemerintah, dengan tujuan pupuk hanya diperuntukkan untuk pertanian, termasuk petani pangan, ternak dan pertanian rakyat. Permasalahan yang terjadi adalah lambatnya pembagian rabuk susulan, apabila terlambat hingga sepekan maka akan berdampak pada hasil panen. Adapun persoalan yang lain yakni tidak adanya kesesuaian Harga Eceran Tinggi (HET). Tingginya harga pupuk bersubsidi yang ada di Kios Kios merupakan modal pembuatan yang substansial dan salah satu penentu pengembangan produksi pertanian. Harapannya kebijakan tersebut mampu melindungi para petani. Petani diberikan subsidi pupuk oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Program tersebut akan dilaksanakan dalam kerangka untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bantuan pemasokan pupuk yang berimbang pada prinsip jenis, kuantitas, tarif, lokasi, waktu dan kualitas sangat dibutuhkan. Tugas pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dapat diperpanjang dan dibatasi sesuai dengan kepentingan pemerintah daerah. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Salah satu yang menjadi prioritas pembangunan ialah sektor pertanian. Subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk upaya negara dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam konteks pembangunan pertanian, faktor penting dan strategis untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta merupakan bagian terpenting dan integral dari sistem pertanian ialah pupuk.

Penjabaran singkat tentang kebijakan subsidi pupuk secara langsung yakni bahwa suatu kebijakan subsidi yangmana petani memperoleh dana subsidi harga secara langsung dari pemerintah (misalnya berupa uang) sehingga dalam transaksi pembelian rabuk, maka seorang petani akan memperoleh harga pasar, tetapi petani tersebut hanya membayar tarif bersih sebesar harga pasar yangmana dikurangi dengan subsidi harga yang diterima oleh petani. Adapun peluang profit dari kebijakan tersebut ialah penentuan tarif atau harga pupuk untuk suatu jenis di pasar hanya tersedia satu macam, yangmana dapat meminimalisir adanya potensi penyelewangan dalam persoalan penyediaan pupuk yang diakibatkan oleh dualisme harga, petani dapat lebih merasakan prosedur penyaluran yang sederhana, karena petani dapat menerima subsidi pupuk secara langsung, jumlah data petani yang berhak memperoleh dan kapasitas pupuk bersubsidi di dapatkan secara valid maka perhitungan besaran subsidi bisa lebih sederhana.

Secara singkat kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah bahwa suatu kebijakan subsidi dimana petani memperoleh anggaran subsidi harga secara langsung dari pemerintah (misalnya dalam bentuk uang) yang pada akhirnya dalam transaksi pembelian pupuk, seorang petani akan memperoleh harga pasar, akan tetapi petani tersebut hanya membayar harga bersih sejumlah harga pasar di dengan bantuan harga yang petani terima. Sementara itu peluang profit dari kebijakan subsidi pupuk secara langsung adalah biaya pupuk untuk suatu jenis pupuk di pasar hanya satu jenis sehingga peluang terjadinya penyelewangan dalam permasalahan penyediaan pupuk yang disebabkan oleh dualisme harga dapat di minimalkan, proses penyaluran akan lebih sederhana dan lebih dirasakan oleh petani lantaran bantuan pupuk dapat diperoleh secara langsung, perkiraan besaran bantuan dapat lebih disederhanakan jika data jumlah petani yang mempunyai hak untuk mendapatkan dan volume pupuk yang subsidi didapatkan secara valid.

Pupuk berperan penting untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Oleh karenanya pemerintah terus menyarankan pemakaian pupuk yang efektif melalui beragam kebijakan meliputi dari segi teknis, pengadaan dan penyaluran maupun harga melalui subsidi. Peluang pertanian di Ponorogo termasuk Desa Ngabar terbilang besar, karena tiap tahun pasokan pupuk subsidi selalu terdistribusi melalui kelompok-kelompok tani di Desa Ngabar sesuai dengan prosedur berlaku. Walau

pun petani di Desa Ngabar sebagian kecil masih mengeluhkan tentang kualitas dan jumlah pupuk subsidi, akan tetapi sejauh ini mereka masih tetap mengandalkan pupuk subsidi dibandingkan dengan membuat pupuk tradisional atau pun membeli pupuk non-subsidi yang tarifnya lebih mahal. keluhan warga masyarakat menanggapi persoalan jumlah pupuk yang dirasa kurang, akan tetapi distribusi pupuk subsidi bersifat pemerataan sehingga perbedaan status maupun luas lahan memang belum diatur sedemikian rupa. Maka dari itu wajar ketika antar satu petani dengan petani lainnya memiliki perbedaan jumlah konsumsi pupuk, sehingga ketika hanya mengandalkan pupuk subsidi tentu aktivitas pertanian masyarakat tidak akan berjalan lancar. Pendistribusian pupuk yang diterapkan oleh Dinas Pertanian Ponorogo dapat disimpulkan telah memenuhi prosedural sebagaimana regulasi resmi, maka dari itu terkait keluhan sebagian masyarakat yang memiliki pendapat tentang kurangnya jumlah pupuk, jatah pupuk, serta kualitas pupuk tidak dapat dianggap sebagai nilai tunggal mengingat sifatnya variatif. Pada intinya masing-masing kelompok tani atau petani memiliki karakteristik yang berbeda-beda, terutama ketika terdapat selisih kepemilikan lahan lumayan kentara.

Adapun pemasokan dan pembagian pupuk harus memenuhi 6 prinsip (enam) tepat, yaitu : (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, dan (6) kualitas. Sektor pertanian merupakan area yang sangat fundamental, maka dari itu prioritas pembangunan diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas lapangan kerja. Pemerintah menciptakan kartu tani untuk menciptakan keterbukaan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi kepada petani. Kebijakan penyaluran pupuk dengan menggunakan kartu tani berlaku pada tahun 2017. Hal tersebut sebagai salah satu usaha terjaminnya keterbukaan atau kejelasan dan tanggung jawab dalam pengalokasian pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani, dan menindaklanjuti pertimbangan Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka akan dilakukan uji coba pemakaian kartu tani sebagai alat untuk menebus pupuk bersubsidi kepada petani oleh pedagang resmi, yang mana pengalokasian pupuk bersubsidi akan lebih reliabel dan tepat sasaran bagi para petani yang berhak memperolehnya. Faktanya, di Desa Ngabar

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2021 hanya 43 % alokasi pupuk subsidi untuk petani, padahal kebutuhan petani di Ponorogo mencapai 184.000 ton pupuk berdasarkan jumlah petani yang terdaftar di Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Namun alokasi pupuk hanya 101.000 ton. Pada akhirnya untuk mengakali kebutuhan pupuk tersebut, petani diminta untuk memakai pupuk nonsubsidi atau dengan menambahkan pupuk organik.

Kebijakan pemerintah pusat terkadang tidak selaras dengan keinginan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Mereka mengeluarkan kebijakan tanpa adanya pembicaraan dan penyelesaian secara langsung apa pemicu dari pengurangan jatah pupuk bersubsidi dan bagaimana upaya untuk mencegah kelangkaan pupuk dan alternatif bagi petani dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan adanya pupuk bersubsidi sangat diharapkan bagi petani Indonesia. Dengan hadirnya pupuk bersubsidi di tengah-tengah petani, hal itu tentunya membantu kesejahteraan ketahanan pangan rakyat Indonesia.

Dengan meninjau persoalan kebijakan subsidi pupuk yang masih diperbincangkan dengan nilai subsidi sudah memperoleh belasan triliun rupiah per tahun, maka untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan petani dan apa yang terjadi sebenarnya sehingga persoalan pupuk bersubsidi masih muncul hingga saat ini.

Bersumber pada latar belakang tersebut diatas, sebagai dasar peninjauan penulis untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat kelompok tani dalam kesuksesan pendistribusian pupuk di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi Perbup No. 188.45/270/405.22/2022 Tentang Pendistribusian Pupuk Bersubsidi (Studi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah tentang tata kelola pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana dampak dari tepat tarif dan tepat jumlah pupuk terhadap pemasukan petani?
3. Bagaimana efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Pertanian tentang pendistribusian pupuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah tentang tata kelola pupuk bersubsidi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tepat tarif dan tepat jumlah pupuk terhadap pemasukan petani.
3. Untuk mengetahui efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi bagi kelompok tani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pertanian tentang pendistribusian pupuk.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi penulis, harapannya karya tulis ilmiah ini mampu memberikan wawasan serta pengetahuan terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan pupuk bersubsidi di Indonesia serta akibatnya secara langsung terhadap para petani, khususnya di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi terkait kebijakan pemerintah pusat dalam hal penanganan pupuk bersubsidi di

Indonesia serta dampaknya secara langsung terhadap para petani, khususnya di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dan mempunyai nilai yang berdaya guna untuk kepentingan bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut maupun penelitian sejenis.

E. Penegasan Istilah

Agar istilah-istilah dalam penelitian ini tidak terjadi salah artikan dari pokok pembahasan yang diteliti, maka penulis membatasi istilah tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua arti: penerapan atau implementasi. Definisi umum implementasi, di sisi lain, adalah tindakan atau implementasi dari rencana yang matang dan terperinci (matang). Menurut Solicin Abdul Wahab (1997), implementasi adalah perbuatan atau *action* yang dilakukan oleh seseorang, pejabat, kelompok pemerintah, atau sektor swasta untuk mencapai tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut penulis, implementasi adalah tindakan yang dilakukan di lapangan sesuai dengan rencana.

2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah atau yang dikenal dengan istilah kebijakan publik, istilah umumnya ialah kebijakan publik sebagai arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan kendala dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkannya untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu sasaran atau maksud tertentu (Friedrich, 2010). Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah juga memiliki tujuan yang berbeda-beda, seperti:

- a. .Menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Untuk melindungi hak-hak masyarakat.
- c. Untuk menciptakan suatu ketenteraman dan kedamaian di lingkungan masyarakat
- d. Realisasi Kesejahteraan Sosial

3. Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan, pengertian pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pemasokan dan pembagiannya memperoleh bantuan dari Pemerintah untuk kepentingan petani yang dilaksanakan atas dasar agenda Pemerintah di sektor pertanian. Dalam hal ini pupuk bersubsidi terdiri dari Urea, SP 36, ZA dan NPK.

4. Distribusi

Setiap perusahaan memiliki pola pemasaran yang berbeda-beda. Sebuah perusahaan dapat membagikan produknya langsung kepada pelanggan atau dapat juga dengan mendistribusikannya melalui perantara dalam saluran distribusi. Sebagian besar perusahaan bekerjasama dengan perantara penjualan untuk menyalurkan produknya ke pasar. Perantara pemasaran membentuk suatu saluran pemasaran atau juga yang disebut saluran perdagangan atau saluran distribusi.

Menurut Hollensen (2010:14), distribusi adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada konsumen. Pada umumnya pengambilan produk dari produsen ke konsumen sebagai saluran distribusi dapat dilihat dari pemikiran pemasaran. Sedangkan menurut Tjiptono dan Chandra (2008:585), distribusi adalah proses penjualan yang berupaya mempercepat dan memudahkan penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan (jenis, jumlah, tempat, dan saat dibutuhkan).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya distribusi merupakan upaya untuk memudahkan atau menyampaikan barang dan jasa dari produsen sampai kepada konsumen.

a. Terdapat 4 (empat) faktor penting pada kegiatan distribusi, yaitu:

1. Fasilitas

Aspek fasilitas merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam kegiatan distribusi. Kelengkapan dari fasilitas yang dibutuhkan oleh proses distribusi tentunya akan mendukung kelancaran serta mendukung kinerja proses distribusi secara lebih maksimal.

2. Transportasi

Dalam proses distribusi, transportasi juga tidak kalah pentingnya. Pertimbangan ketersediaan sarana transportasi akan sangat mempengaruhi kebijakan kegiatan distribusi yang harus diambil. Semakin bagus ketersediaan transportasi, maka akan semakin mempermudah proses produksi.

3. Ketersediaan Barang/Jasa

Ketersediaan yang menyangkut barang jadi, bahan baku, bahan setengah jadi, jasa, dan lain sebagainya juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kekurangan barang/jasa yang telah dipesan oleh konsumen.

4. Tingkat Penjualan

Bagi suatu perusahaan tingkat penjualan sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan. Maka mengelola tingkat penjualan harus diperhatikan dengan baik.

F. Landasan Teori

1. Teori Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen pemerintahan, tidak hanya dalam arti pemerintah mempengaruhi aparatur negara, tetapi juga instrumen pemerintahan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada dasarnya adalah keputusan atau serangkaian tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan alokasi sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan publik. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai aturan tertulis dan keputusan resmi dari suatu organisasi yang secara pribadi dan publik mengatur semua aspek kehidupan manusia. Titmus, di sisi lain, mendefinisikan politik sebagai prinsip-prinsip

yang mengatur tentang perilaku yang ditujukan pada maksud tertentu. Politik selalu mengarah pada persoalan dan mengarah pada tindakan. Politik umumnya digunakan untuk menggambarkan perilaku seorang aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga) atau sekelompok aktor dalam bidang kegiatan tertentu

Kebijakan adalah instrumen pemerintahan, bukan hanya dalam arti *Government* yang melibatkan aparatur negara, melainkan juga *governance* yang merambah pada pengendalian sumber daya publik. Kebijakan intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengendalian dan penyaluran SDA, keuangan dan manusia demi kepentingan publik. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai aturan dalam bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup *private* maupun *public*.

Adapun menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang difokuskan pada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa mengacu pada persoalan dan mengacu pada perbuatan. Secara umum, kebijakan diterapkan untuk mengarah pada tingkah laku seorang pelaku (misalnya pejabat, kelompok atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah pelaku dalam bidang kegiatan tertentu. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoah, 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan agenda yang individual atau terasingkan. Dengan demikian, kebijakan adalah sesuatu yang dilaksanakan pemerintah yang dicetuskan serta berdasar dari semua peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan tidak termasuk peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan kompleks bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu reaksi atas kejadian yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang bermasalah, maupun menciptakan stimulus atas tindakan bersama bagi para pihak yang memperoleh tindakan yang tidak rasional atas upaya bersama tersebut.

Tentu saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus melihat aspek sosial masyarakat, karena untuk mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang diterima oleh masyarakatnya.

2. Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus bertambah, pemerintah menyediakan beragam prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini ditujukan untuk membantu petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya agar dapat mengimplementasikan pemupukan berimbang, selaras dengan kondisi spesifik lokasi, sehingga mencapai hasil pertanian yang optimal.

Pupuk termasuk kebutuhan sarana produksi penting dan fundamental guna meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Maka dari itu, subsidi dibutuhkan untuk keperluan pupuk. Pemerintah memberikan subsidi kepada petani berupa dana yang mampu meng-cover perbedaan harga pokok dengan HET. Kebijakan subsidi pupuk ditujukan untuk memenuhi: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Dalam sejarahnya, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Akan tetapi, substansi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi atau HET (Syafa'at et al. 2006). Ketika Indonesia

mencapai swasembada beras pada tahun 1984, kebijakan subsidi pupuk turut berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Pada tahun 1998, krisis multidimensi dan tekanan IMF memaksa pemerintah mencabut subsidi pupuk mulai tahun 1999-2000. Pada tanggal 1 Desember 1998, pemerintah menetapkan penghapusan subsidi pupuk untuk tahun 1999 dan membiarkan distribusi pupuk mengikuti prosedur pasar. Sebagai kompensasinya, pemerintah meningkatkan tarif gabah kering giling (GKG) dari Rp 1.000 menjadi Rp1.400-1.500/kg, menurunkan suku bunga kredit usaha tani (KUT) dari 14% menjadi 10,50%, dan menaikkan plafon kreditnya dari Rp1,496 juta menjadi Rp 2 juta (Ilham 2001).

Pada tahun 2000-2002, pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk melalui mekanisme insentif subsidi harga gas untuk penghasil pupuk. Gas merupakan zat terbesar dalam struktur biaya produksi pupuk urea, yakni 50-60%. Industri pupuk urea saat ini memproduksi sekitar 8% dari total produksi gas bumi nasional. Dengan menetapkan harga gas bumi untuk produsen di bawah harga pasar, diharapkan pupuk urea dapat dijual kepada petani sesuai dengan HET yang ditentukan pemerintah (Herman *et al.* 2005). Untuk pupuk nonurea, harganya mengikuti mekanisme pasar (PSE- KP 2007).

Pada tahun 2003-2006 kebijakan subsidi pupuk masih tetap merujuk pada kebijakan subsidi harga gas untuk perusahaan pupuk dan HET untuk harga gabah di tingkat petani. Nilai subsidi kepada produsen pupuk adalah sebesar selisih antara harga gas berdasarkan kontrak dengan harga gas yang ditetapkan pemerintah (US\$ 1,0/MMBTU). Untuk pupuk nonurea, subsidi diberikan melalui subsidi harga jual produk. HET pupuk ditetapkan sebagai berikut: urea Rp1.050/ kg, SP36 Rp1.400/kg, ZA Rp950/kg, dan NPK Rp1.600/kg. Pada tahun 2006, harga gas yang ditetapkan pemerintah dinaikkan menjadi US\$ 1,30/MMBTU karena harga gas terus meningkat (PSE- KP 2007).

Dalam penerapan kebijakan subsidi pupuk, dibangun suatu sistem distribusi pupuk secara nasional, dari produsen sampai petani melalui tingkatan lini I, II, III, dan IV. Lini I adalah lokasi gudang di wilayah pabrik

(untuk produk dalam negeri) atau di wilayah pelabuhan tujuan (untuk pupuk impor). Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan. Lini III adalah lokasi gudang distributor dan atau produsen di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk/ ditetapkan oleh produsen. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer (kios) yang ditunjuk/ditetapkan oleh distributor. Karena pupuk yang ada di gudang lini I sampai dengan lini III masih milik produsen, pelaku yang ada dalam rantai distribusi hanya terdiri atas produsen, distributor, dan pengecer.

3. Peranan Kelompok Tani

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam kaitannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pengertian kelompok tani adalah petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

Kelompok tani memiliki beberapa unsur pengikat, yaitu :

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya;
- b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama diantara para anggota;

- c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya;
- d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya;
- e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

Fungsi kelompok tani yang lain dalam keterkaitannya pada pendistribusian pupuk bersubsidi adalah sebagai wahana kerjasama petani, kelompok tani tak terlepas dari masalah-masalah pupuk yang diberikan pemerintah kepada petani. (Anonimus, 2006).

Fungsi peran kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi adalah:

- a. Sebagai kelas belajar sebagai media interaksi dalam belajar para anggota kelompok. Media sebagai asah para anggota dalam menyerap informasi tentang penyaluran pupuk subsidi.
- b. Sebagai wadah kerja sama dalam menyelenggarakan kegiatan berdasarkan musyawarah dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
- c. Untuk mempermudah penyaluran pupuk bersubsidi sampai tepat ke tangan petani.
- d. Sebagai organisasi kegiatan bersama adanya pembagaian tugas antar anggota untuk mencapai tujuan kelompok dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
- e. Pupuk bersubsidi hanya untuk petani yang bergabung dalam kelompok tani, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Ecer Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.

4. Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi

Menurut Subaygo (2000) efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas program dalam hal ini

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sedangkan Agung Kurniawan (2005) mengemukakan bahwa efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, operasi kegiatan program atau misi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pupuk adalah material organik maupun anorganik yang mengandung zat hara yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman dengan tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas. Pupuk merupakan salah satu faktor produksi utama selain lahan, tenaga kerja dan modal dalam usaha tani. Jenis pupuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk organik (pupuk alam) dan pupuk anorganik (pupuk buatan).

Menurut Tjiptono dan Chandra (2008:585), distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, tempat, dan saat dibutuhkan). Pemerintah, Produsen, Distributor dan Pengecer merupakan lembaga yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Jika pengadaan dan penyaluran pupuk tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu, maka upaya ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai. Untuk itu diharapkan realisasi peraturan pupuk di jadikan patokan bagi produsen, distributor dan pengecer (Adnyana dan Kariyasa, 2000).

Pupuk berperan penting dan strategis dalam peningkatan pembuatan dan daya produksi pertanian. Maka dari itu, pemerintah terus meningkatkan pemakaian pupuk yang berdaya guna melalui berbagai kebijakan meliputi sudut pandang teknis, pengadaan dan penyaluran maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan penyaluran pupuk yang telah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi

(HET), besaran subsidi hingga sistem penyalurannya ke pengguna pupuk sudah cukup menyeluruh.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang mencukupi dengan HET yang telah ditentukan. Secara lebih eksklusif, masih sering terjadi beragam perkara diantaranya di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo masih ditemukan kelangkaan pupuk bersubsidi, pada tahun 2021 hanya 43 % alokasi pupuk subsidi untuk petani.

Penggunaan Pupuk Kimia di Pertanian awal mulanya pemakaian pupuk kimia mampu mengembangkan hasil panen, namun seiring berjalannya waktu hasil panen semakin menurun dan kondisi tanah semakin lama semakin tandus. Dari beragam penelitian yang mendalam dan memakan waktu yang lama akhirnya ditemukan bahwa kehilangan bagian biologislah salah satunya yang menjadikan tanah semakin lama semakin tandus. Bagian biologi tanah dibagi menjadi dua, yaitu mikroba tanah dan hormon pertumbuhan pada tumbuhan. Pupuk organik secara tentatif telah mengembangkan hasil pertanian namun profit hasil panen akhirnya menyusut banyak dengan adanya pemakaian pupuk ini dikarenakan adanya sesuatu yang timbul akibat adanya polusi lingkungan pada lahan pertanian. Pencemaran kimia dari pupuk merupakan pencemaran beberapa bagian hara tanaman. Tanah-tanah yang di alihkan oleh pengikisan biasanya memuat bagian hara yang lebih tinggi daripada tanah yang ditinggalkan karena lapisan tanah yang terkikis biasanya adalah lapisan atas yang subur. Akibat pencemaran dari penggunaan pupuk organik yang terlalu banyak secara terus-menerus akan mengakibatkan bagian hara yang ada dalam tanah menyusut. Di Indonesia sendiri, mayoritas lahan pertanian menjadi lahan kritis. Lahan pertanian yang telah masuk dalam keadaan kritis mencapai 66% dari total 7 juta hektar lahan pertanian yang ada di Indonesia. Kesuburan tanah di lahan-lahan yang memakai pupuk anorganik dari tahun ke tahun menurun. Keberhasilan dilihat dan ditetapkan dari seberapa banyaknya hasil dari panen yang diperoleh, bukan dilihat dari kondisi dan keadaan tanah serta hasil panennya. Semakin berlimpah hasil panen, maka

pertanian akan dipandang semakin maju. Bahan organik ialah salah satu zat tanah yang sangat esensial bagi ekosistem tanah, yangmana bahan organik termasuk sumber pengikat hara dan substrat bagi mikrobia tanah. Bahan organik tanah termasuk bahan yang esensial untuk mengganti kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia maupun biologi. Upaya untuk membenahi dan menjaga muatan bahan organik untuk menjaga produktivitas tanah mineral masam di daerah tropis perlu dijalankan.

5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M-DAG/ PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan Umum atau Public Service Obligation (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menyempurnakan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 /M-DAG/ PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah bagian yang menjabarkan terkait variabel yang ada di teori. Definisi operasional merupakan bagian yang menjelaskan suatu konsep atau variabel agar dapat dinilai dengan cara mengamati pada indeks suatu konsep atau variabel (Dr. Juliansyah Noor, S.E., 2016) Definisi operasional bertujuan untuk mengoperasionalkan penelitian yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan untuk mendapatkan hasil atau output pada penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan fokus utama dalam penelitian ini, peneliti akan memaksimalkan pemahaman dan akumulasi data untuk ditelaah dengan cermat agar berimbang dengan tujuan penelitian serta mendapati implementasi peraturan yang diteliti pada lingkup lokasi penelitian. .
2. Distribusi pupuk bersubsidi

Di dalam distribusi pupuk terdapat indikator sebagai berikut :

 - a. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang distribusi pupuk
 - b. Efektifitas distribusi pupuk bersubsidi
 - c. Pengaruh tepat harga dan tepat jumlah terhadap pendapatan petani
3. Pupuk bersubsidi yang merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah .setiap daerah memiliki jumlah alokasi pupuk yang berbeda serta kendala tersendiri dalam mendapat pupuk bersubsidi.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna (data yang sebenarnya, serta data yang pasti yang mengandung nilai dibalik data yang tampak). Dalam penelitian bentuk deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif pada saat penelitian berlangsung cenderung memusatkan perhatian pada masalah aktual.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purpose* dan *snowbal*, teknik pengumpulan data triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti memilih melakukan penelitian ini di wilayah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa tersebut dikarenakan mayoritas petani menanam tembakau pada saat musim kemarau, sehingga sering terjadi penggunaan pupuk yang tidak sesuai RDKK atau jatah alokasi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dimana hal tersebut memicu terjadinya kekurangan pupuk di wilayah tersebut serta kelangkaan pupuk bersubsidi bagi petani.

I. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi secara langsung dengan melihat keadaan real dilapangan dan wawancara langsung kepada responden kelompok tani di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

1. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan dan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan observe yang sebenarnya, melalui kegiatan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social yang sukar diperoleh menggunakan metode lain. Dengan observasi dapat

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya. (Mania, 2008)

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang sebenarnya secara langsung. Didalam observasi peneliti harus memperhatikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan informan, mempertanyakan informasi yang menarik serta mempelajari dokumen-dokumen yang ada.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi atau interaksi guna mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau subjek penelitian. (Mudjia Rahardjo, 2011) Wawancara yaitu salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan narasumber, wawancara dilakukan setelah observasi. Secara garis besar didalam wawancara kali ini akan melibatkan dua komponen yaitu pewawancara atau peneliti itu sendiri dan orang-orang yang akan di wawancarai. Didalam wawancara kali ini akan menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti harus menyiapkan lebih dahulu bahan pertanyaan yang akan di ajukan didalam wawancara tersebut. Dari hasil wawancara tersebut nantinya peneliti harus mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan. Namun didalam wawancara terstruktur ini biasanya peneliti begitu terpaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sehingga terkesan kaku.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah informasi yang berawal dari keterangan penting yang dapat diperoleh baik dari lembaga atau organisasi maupun individu. Pada dokumentasi penelitian

ini merupakan pengambilan gambar yang di lakukan oleh peneliti guna untuk memperkuat hasil dari penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk gambar atau tulisan. Pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat di lakukan oleh peneliti guna mendapatkan data dari berbagai hal. (Riky Sapto Pramujo, 2018)

- b. Data Sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung yang ada kaitannya dengan judul penelitian dalam bentuk data yang didapatkan dari instansi terkait.

f. Teknik Penentuan Informan

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang mana orang tersebut ikut serta terlibat, tau dan memahami secara langsung mengenai penelitian tersebut. Pemilihan informan pada penelitian ini yaitu dengan teknik purposive sampling. Menurut (Haris, 2015) memaparkan bahwa teknik purposive sampling subjek penelitian yang dipilih haruslah mempunyai ketertarikan dengan tujuan penelitian, jadi teknik purposive sampling ini merupakan upaya untuk menentukan narasumber yang di dasari atas pertimbangan tertentu dan sumber data yang relevan dijadikan sebagai sampel. Peneliti memilih narasumber berikut dikarenakan narasumber tersebut berkaitan erat satu dengan yang lain, dan informan inilah yang terlibat secara langsung untuk meningkatkan desa wisata. Yang menjadi informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Daftar Informan :

- Wawancara kepada Dinas pertanian Kabupaten Ponorogo
- Wawancara kepada Direktur Bumdes Desa Ngabar.
- Wawancara terhadap petani Desa Ngabar.

J. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi.

a. Observasi

Observasi merupakan upaya untuk mengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilakukan observasi guna memperoleh data terkait kondisi yang sebenarnya di lapangan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan melakukan evaluasi. Sehingga, observasi penting dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi, kebudayaan, keadaan masyarakat serta kondisi lingkungan di wilayah Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo.

b. Wawancara

Interview diperlukan sebagai salah satu cara untuk akumulasi data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk mendeteksi persoalan yang harus dikaji, dan juga apabila peneliti ingin menggali hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan pribadi.

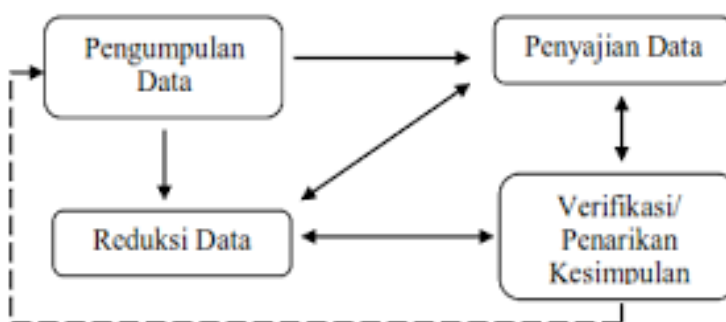
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan akumulasi dan penulisan data sekunder tentang kejadian yang sudah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, audio (rekaman), maupun karya-karya monumental seseorang. Dokumen yang berupa tulisan yang berkaitan dengan penyaluran, pengurusan pupuk bersubsidi di wilayah Desa Ngabar Kabupaten Ponorogo.

g. Analisa Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data disusun berdasarkan kategori lalu

dijabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, milah dan membuat kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) model analisa disebut sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1.1
Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana
 (Miles et al., 2014)

Sumber: (Sugiyono, 2014) analisis interaktif miles&huberman

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan selama jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan validasi data.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan dengan pemikiran yang lebih mendalam. Hasil wawancara bisa didiskusikan dengan orang lain, sehingga peneliti dapat mengembangkan pemikiran dan data yang direduksi memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

c. Penyajian data

Setelah reduksi data, maka tahap selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik, teks dan lainnya. Dengan penyajian data, maka akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta tindakan kerja lanjutan dari apa yang dipahami tersebut.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah dengan menjabarkan atau menggambarkan suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi lebih jelas dan rinci. Penarikan kesimpulan yaitu penarikan arti dari data apa yang telah ditampilkan. Cara yang dapat dilakukan dalam proses penarikan kesimpulan adalah dengan melakukan pencatatan, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

h. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

- a. Kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keraguan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Untuk menguji kredibilitas peneliti perlu meningkatkan ketekunan dan kecermatan, dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan demikian, peneliti akan semakin cermat dalam menyusun laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.
- b. Transferability Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Pertanyaan yang

ada kaitannya dengan nilai transmisi hingga sekarang masih bisa diterapkan/Dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transmisi sangat bertumpu pada konsumen, sehingga ketika penelitian dapat diperlukan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transmisi masih dapat dipertanggung jawabkan.

- c. Dependability Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila 75 penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.
- d. Confirmability Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

